

RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA TANAH GERAK DI DESA PURU KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK

Fauzia Salsabila
NPP. 32.0522

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: 32.0522@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Sutiyo, S.STP., M.Si., Ph.D

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the issue of land movement disaster in Puru Village, Suruh Sub-district, Trenggalek Regency, which has caused significant damage to residential buildings and infrastructure. This situation required an immediate relocation effort to ensure the safety and sustainability of the residents' lives. **Purpose:** This study aims to examine the conditions of the land movement disaster, the relocation process undertaken, and the impact of the relocation on the welfare of the affected residents. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach and analysis of the relocation process based on Michael Cernea's Resettlement and Reconstruction Models. Data collection techniques include observation, in-depth interviews (8 informants), Focus Group Discussions (8 households), and documentation. **Result:** The findings show that the relocation was carried out with active community participation and support from local government. Residents did not lose their livelihood as agricultural and livestock activities continued in the previous location. Adaptation to the new environment went smoothly, and the relocation had a positive effect on residents' welfare, particularly in terms of safety, access to public facilities, and improved social structure. However, the study found that some administrative aspects such as formal documentation of the relocation task force were not well-archived, and basic facilities like sanitation in the new area remain insufficient. **Conclusion:** The relocation of residents affected by the land movement disaster in Puru Village has been well-executed due to the active involvement of the community and responsive local government. To ensure long-term sustainability, it is recommended to develop agricultural and livestock-based livelihood strategies and improve basic facilities in the new settlement area.

Keywords: Relocation; Land Movement Disaster; Community Welfare

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan bencana tanah gerak di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, menyebabkan kerusakan parah pada rumah dan infrastruktur warga, sehingga diperlukan relokasi untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan hidup mereka. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi bencana tanah gerak, proses relokasi yang dilakukan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga yang direlokasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, *Focused Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap proses relokasi menurut Michael Cernea tentang *Resettlement and Reconstruction Models*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (8 informan), FGD (8 rumah tangga), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi dilakukan secara partisipatif dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Warga tidak mengalami kehilangan mata pencaharian karena aktivitas peternakan dan pertanian masih dapat dilakukan di lokasi lama, dan adaptasi terhadap lingkungan baru berjalan dengan baik. Relokasi ini secara umum berdampak positif terhadap kesejahteraan warga, terutama dari segi keamanan, akses terhadap fasilitas umum, dan kehidupan sosial yang lebih terorganisir. Berdasarkan kajian yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi tergolong baik, meskipun masih belum tersip dengan baik seperti susunan surat keputusan satuan tugas penanganan relokasi dan fasilitas di lokasi yang baru beberapa belum tercukupi dengan baik seperti sanitasi. **Kesimpulan:** Proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dan pemerintah yang tanggap dengan program relokasi ini. Guna mensejahterakan warga terdampak, disarankan untuk mengembangkan strategi adaptasi dalam sektor peternakan dan pertanian agar mata pencaharian warga tetap berjalan optimal dan kondusif. Dalam hal ini, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai strategi terbaik dalam penyediaan lahan usaha bagi warga yang terdampak relokasi, terutama dalam sektor pertanian dan peternakan.

Kata kunci: Relokasi; Bencana Tanah Gerak; Kesejahteraan Warga

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial, akibat letaknya di kawasan Ring of Fire yang rawan gempa, erupsi, longsor, dan tanah gerak. Menurut Frege et al. (2023) pada *World Risk Index*, Indonesia menempati peringkat kedua negara paling rawan bencana di dunia, dengan skor 43,5 dari 100. Data BNPB menunjukkan bahwa tanah longsor dan tanah gerak merupakan bencana terbanyak ketiga setelah banjir dan puting beliung, dan sepanjang tahun 2023 tercatat 5.400 kejadian bencana yang merusak ribuan rumah dan fasilitas umum. Provinsi Jawa Timur, sebagai provinsi terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk besar, memiliki tingkat risiko multibahaya yang tinggi di sebagian besar wilayahnya, termasuk Kabupaten Trenggalek yang tergolong berisiko tinggi akibat faktor geologi, klimatologi, topografi, dan vegetasi.

Kabupaten Trenggalek terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan curam serta wilayah karst di bagian selatan. Struktur geologi wilayah ini sangat kompleks, terdiri dari berbagai jenis batuan seperti batuan sedimen, batu kapur, andesit, dan tanah lempung yang rentan terhadap jenuh air. Kondisi geografis ini menyebabkan wilayah Trenggalek, termasuk Kecamatan Suruh, sangat rawan terhadap bencana tanah gerak, terutama saat curah hujan tinggi. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yang juga menjadi bulan dengan kejadian bencana terbanyak, termasuk tanah gerak yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan memaksa warga untuk mengungsi.

Salah satu wilayah terdampak terparah adalah Desa Puru di Kecamatan Suruh, di mana bencana tanah gerak pada Oktober 2022 menyebabkan kerusakan serius pada rumah warga, jalan dusun, dan infrastruktur lainnya. Retakan tanah dan bangunan terjadi akibat lapisan tanah lempung yang jenuh air.

Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian material tercatat mencapai jutaan rupiah, dan beberapa rumah tidak lagi layak huni. Pemerintah daerah, melalui BPBD dan instansi terkait, segera merespons dengan observasi lapangan, pemberian bantuan, serta menetapkan Desa Puru sebagai wilayah tidak layak huni. Proses relokasi pun menjadi langkah wajib, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti pemilihan lokasi baru, ketersediaan anggaran, serta kelayakan lingkungan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Fenomena tanah gerak di Desa Puru ini memberikan beberapa permasalahan bagi pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Berbagai studi sebelumnya telah membahas relokasi sebagai strategi mitigasi terhadap bencana alam, khususnya tanah gerak. Penelitian Ardiyanto (2017) di Gunungkidul, Purwanto (2017) di Pacitan, serta Ikhwan dan Widiyanto (2023) di Bantul, menunjukkan bahwa proses relokasi berjalan cukup efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan adanya dukungan pemerintah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan relokasi. Kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan psikologis warga terdampak dalam satu kesatuan analisis relokasi belum banyak ditemukan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum memberikan evaluasi yang mendalam terkait dampak jangka panjang relokasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak relokasi terhadap akses mata pencaharian, keberlanjutan ekonomi, kohesi sosial, dan kondisi psikologis warga belum menjadi fokus utama dalam banyak studi. Padahal, keberhasilan relokasi tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik permukiman baru, tetapi juga dari kemampuan warga untuk beradaptasi secara sosial, mempertahankan kesejahteraan ekonomi, dan memperoleh rasa aman secara emosional di lingkungan baru. Ketidakhadiran kajian multidimensional inilah yang menjadi celah penting dalam literatur relokasi bencana tanah gerak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara holistik pelaksanaan relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kondisi bencana dan proses relokasi, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis warga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep relokasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam penanganan relokasi bencana di masa yang akan datang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, Ardiyanto (2017) yang memiliki penelitian berjudul “Relokasi Masyarakat Rawan Bencana : *Studi Tahap Relokasi Di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa proses relokasi berjalan dengan lancar yang melibatkan partisipasi masyarakat dari awal. Dalam proses partisipasi masyarakat, terdapat tantangan yang besar dalam relokasi yaitu pengorganisasian masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun, hasil relokasi yang dilaksanakan berdampak positif dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perubahan positif berupa peningkatan pendapatan keluarga, adanya perubahan sistem masyarakat, lingkungan, dan terbentuknya kekerabatan melalui gotong-royong dalam masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Rosita (2018) dengan judul “Daerah Rawan Bencana Geologi Gerakan Tanah Dalam Arah Kebijakan Mitigasi Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengarah pada kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis melalui strategi dan program prioritas penanggulangan bencana. Pada penelitian ini menjelaskan secara empirik terkait Gerakan Tanah di daerah Nasol yang memberikan kerusakan yang tinggi pada daerah yang rawan terutama pada lereng.

Dalam hal ini peran BNPB adalah menentukan mitigasi sebagai prioritas dalam bencana di Kabupaten Ciamis sebagai sebuah ancaman gerakan tanah pada saat pergantian musim.

Ketiga, penelitian oleh Ikhwan & Widiyanto (2023) yang berjudul “Mitigasi Bencana Tanah Longsor Melalui Relokasi Permukiman Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul” yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mitigasi bencana tanah longsor dan tanah bergerak di Desa Wukirsari dilakukan sesuai dengan tahap mitigasi bencana menurut Rahman (2015). Upaya mitigasi penelitian ini dimulai dari pemetaan zona rawan longsor, penyusunan dan perumusan rencana tindakan (*action plan*) melalui Focus Group Discussion (FGD), hingga pemberian alternatif tindakan. Relokasi permukiman merupakan alternatif tindakan yang dipilih di penelitian ini dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di area rawan longsor. Kebijakan relokasi ini dinilai sebagai bentuk mitigasi bencana yang paling efektif, setelah alternatif mitigasi sebelumnya yaitu pemasangan peringatan dini dan pembuatan penahan lereng nyatanya berujung rusak terkena runtuhnya tanah saat musim hujan dan tidak berhasil dalam mengatasi ancaman bencana tanah longsor. Mitigasi bencana melalui *resettlement* di Desa Wukirsari dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari respon masyarakat terdampak relokasi. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa tempat relokasi yang mereka kini tinggal, jauh lebih baik dan lebih aman dari tempat tinggal mereka sebelumnya.

Keempat, penelitian oleh Darlahanus (2024) yang berjudul “Analisis Rencana Pembangunan Lokasi Relokasi Dusun Jati Rejo, Kabupaten Bantul”. Penelitian ini membahas analisis rencana pembangunan lokasi relokasi Dusun Jati Rejo, Kabupaten Bantul, yang merupakan wilayah rawan longsor. Tujuan penelitian adalah untuk menghitung kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur relokasi yang mencakup rumah tinggal tipe 54, jalan umum, dan penerangan jalan umum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan perhitungan volume pekerjaan, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) berdasarkan regulasi tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya pembangunan rumah tipe 54 sebesar Rp184.304.000, biaya perbaikan jalan umum sebesar Rp260.273.088, dan biaya pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp257.920.740. Temuan utama menunjukkan bahwa rencana pembangunan cukup detail dalam aspek teknis namun belum mencakup instalasi air dan listrik, serta belum memperhitungkan durasi pelaksanaan proyek. Selain itu, partisipasi masyarakat dan integrasi sosial-ekonomi warga dalam proses relokasi masih minim. Penelitian menyimpulkan bahwa relokasi ini penting untuk keselamatan warga, tetapi perlu disempurnakan dengan perencanaan yang lebih holistik dan koordinasi antarlembaga yang lebih baik. Peneliti menyarankan agar kajian lanjutan memasukkan aspek waktu pelaksanaan, instalasi utilitas dasar, serta pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proyek relokasi.

Kelima, penelitian oleh Miranda (2023) yang berjudul “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Relokasi Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana”. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Dhea Miranda bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam proses relokasi penduduk dari kawasan rawan bencana ke lokasi relokasi Pandu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan teori kinerja Bernardin dan Russel sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2.047 unit rumah yang telah disiapkan, hanya sekitar 30% yang dihuni. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala seperti jarak lokasi relokasi dari pusat kota, fasilitas yang belum memadai (akses jalan, air, listrik), serta keterbatasan transportasi dan layanan pendidikan di lokasi relokasi. Temuan menunjukkan bahwa secara kuantitas BPBD telah berupaya maksimal melalui pembangunan rumah dan himbauan kepada warga, namun kualitas pelaksanaan relokasi belum optimal. Ketepatan waktu pelaksanaan juga menjadi kendala karena masih banyak unit rumah yang belum layak huni, menyebabkan keterlambatan proses relokasi. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dinilai cukup baik melalui kerja sama dengan

instansi terkait dan dukungan dana dari pemerintah pusat. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kinerja BPBD Kota Manado dalam merelokasi penduduk masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan BPBD untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperbaiki fasilitas dasar di lokasi relokasi, mengevaluasi kinerja kelompok masyarakat pelaksana (pokmas), serta memperkuat sosialisasi kepada warga agar proses relokasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Orefice & Innocenti (2024) mengenai *Landslide Susceptibility Analysis* di wilayah pesisir Liguria, Italia, berfokus pada pemodelan kerentanan longsor menggunakan metode *MaxEnt* berdasarkan variabel fisik seperti kemiringan lereng, litologi, dan penutup lahan. Studi tersebut menghasilkan peta kerentanan longsor untuk berbagai jenis gerakan tanah, yang berguna dalam perencanaan mitigasi risiko geologi. Sama halnya dengan penelitian Orefice dan Innocenti, peneliti juga menemukan bahwa terdapat faktor kemiringan lereng yang signifikan dalam mempengaruhi terjadinya tanah gerak di Desa Puru. Kemiringan lereng yang cukup curam di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor utama munculnya retakan pada tanah dan bangunan, yang kemudian berdampak pada relokasi warga terdampak.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian Orefice dan Innocenti bersifat kuantitatif dengan pendekatan geospasial untuk memetakan kerentanan bencana secara regional, sedangkan penelitian ini lebih bersifat kualitatif dan berfokus pada aspek sosial kebencanaan, seperti proses relokasi serta dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan warga. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian tanah gerak melalui sudut pandang sosial yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian dengan judul “*Relokasi Warga Terdampak Bencana Tanah Gerak di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek*” memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ardiyanto (2017) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam relokasi; Rosita (2018) lebih fokus pada kebijakan mitigasi tanpa membahas aspek sosial masyarakat terdampak; Ikhwan & Widiyanto (2023) menilai efektivitas tindakan mitigasi namun tidak mendalami dampak relokasi terhadap kesejahteraan warga; Darlahanus (2024) menyoroti aspek teknis dan pembiayaan pembangunan relokasi; sedangkan Miranda (2023) menilai kinerja lembaga pelaksana tanpa melihat kondisi sosial pasca relokasi. Kelima penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji dampak relokasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis warga secara terpadu.

Penelitian ini menghadirkan pendekatan holistik dengan menganalisis kondisi bencana tanah gerak, proses relokasi yang dijalankan, dan dampak relokasi terhadap kesejahteraan masyarakat dari tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan psikologis. Kebaruan ini terletak pada fokus peneliti terhadap dinamika kehidupan pascarelokasi yang jarang disentuh secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, seperti perubahan relasi sosial warga, keberlanjutan penghidupan, dan penerimaan masyarakat terhadap relokasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan latar belakang lokal dan karakteristik geologis wilayah Trenggalek sebagai bagian dari kerangka mitigasi bencana berbasis konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan relokasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi bencana tanah gerak, proses relokasi permukiman warga yang terdampak, dan dampak relokasi bidang ekonomi, sosial, dan psikologis di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Menurut Simangunsong (2017), metode penelitian merupakan rangkaian teknik untuk memperoleh dan menganalisis data dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk menganalisis proses, tantangan, dan dampak relokasi pada permukiman warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman subjektif warga, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial-ekonomi pasca relokasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, (2023), metode kualitatif berakar pada pemikiran *post positivisme* yang memungkinkan peneliti mengkaji objek dalam kondisi natural tanpa manipulasi, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan interpretasi data. Pendekatan ini sangat relevan untuk menggali pengalaman yang bersifat subjektif, naratif, dan mendalam dari para partisipan penelitian, termasuk warga terdampak, pihak pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari 2025, tepatnya mulai tanggal 6 Januari hingga 20 Januari 2025. Lokasi penelitian berfokus pada dua area utama: lokasi kejadian bencana tanah gerak di Dusun Jajar, Desa Puru, dan lokasi relokasi di tepi Jalan Raya Suruh-Dongko. Pemilihan periode ini memungkinkan peneliti melakukan serangkaian pengumpulan data secara intensif melalui observasi, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan kombinasi dua teknik, yaitu *purposive* dan *saturation*. Teknik *purposive* diterapkan untuk memilih pejabat-pejabat kunci yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan relokasi, meliputi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek (I₁) sebagai informan utama yang bertanggung jawab atas penanganan bencana di tingkat kabupaten. Informan ini dipilih karena memiliki otoritas dan pengetahuan komprehensif terkait kebijakan mitigasi bencana dan proses relokasi. Selain itu, informan kunci lainnya termasuk tim dari Dinas PKPLH (I₂, I₃, I₄) yang bertanggung jawab langsung dalam implementasi program relokasi, serta pejabat di tingkat kecamatan (I₅, I₆) dan desa (I₇, I₈) yang memahami konteks lokal dan dinamika sosial masyarakat terdampak.

Sedangkan teknik *saturation* diterapkan untuk warga terdampak yang direlokasi, dengan mengambil seluruh rumah tangga yang berjumlah 8 keluarga (I₉ - I₁₆). Penggunaan teknik *saturation* ini penting mengingat jumlah rumah tangga yang direlokasi relatif kecil sehingga memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari seluruh populasi untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang pengalaman relokasi dari sudut pandang warga. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan *Focused Group Discussion* atau FGD adalah metode pengumpulan data yang sistematis dan terarah, yang didefinisikan oleh Irwanto (2006) sebagai proses untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok

Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama. Pertama, observasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 20 Januari 2025 untuk mengamati kondisi fisik lokasi bencana dan area relokasi. Kedua, wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dilakukan secara bertahap: wawancara dengan BPBD dan pejabat kecamatan pada 6 Januari 2025, tim PKPLH pada 10 Januari 2025, serta pejabat desa dan warga terdampak pada 14 dan 20 Januari 2025. Ketiga, FGD yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 17.00 di rumah salah satu warga relokasi. Waktu sore dipilih dengan pertimbangan bahwa mayoritas warga berprofesi sebagai petani yang telah kembali dari aktivitas mereka pada jam tersebut. Keempat, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen resmi dari BPBD, Dinas PKPLH, dan Kantor Desa Puru.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengolah data secara sistematis mulai dari kompilasi informasi mentah,

penyaringan data esensial, visualisasi temuan, hingga sintesis seluruh data menjadi kesimpulan yang koheren tentang proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Bencana Tanah Gerak

Kajian mengenai bencana tanah gerak yang terjadi di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek mengindikasikan dampak signifikan terhadap permukiman penduduk setempat. Fenomena geoteknis ini dimanifestasikan melalui retakan struktural pada 11 bangunan, meliputi elemen dinding rumah, lantai, serta infrastruktur jalan desa. Konsekuensi dari kerusakan struktural ini berimplikasi pada ketidaklayakhunian bangunan dan memunculkan risiko keruntuhan pada masa mendatang.

Mekanisme tanah gerak di lokasi penelitian berlangsung secara progresif, dengan indikator awal berupa retakan mikro yang mengalami pelebaran seiring dengan fluktuasi kondisi meteorologis, khususnya intensitas presipitasi. Faktor etiologi utama yang teridentifikasi meliputi karakteristik pedologis yang tidak stabil, curah hujan dengan intensitas tinggi, serta kondisi topografis wilayah dengan gradien kemiringan tertentu.

Berdasarkan investigasi lapangan, terdokumentasi bahwa rentang temporal kejadian bencana dimulai pada 18 Oktober 2022, mengakibatkan dampak pada sepuluh unit rumah tangga dan satu institusi pendidikan. Observasi terhadap tingkat kerusakan menunjukkan variasi, dengan lima rumah mengalami kerusakan parah yang mengharuskan pembongkaran sebagian struktur, dua rumah dengan kerusakan kategori sedang, dan empat bangunan lainnya terdampak dengan tingkat kerusakan yang lebih minimal.

Testimoni narasumber dari kalangan warga terdampak mengkonfirmasi bahwa pergerakan tanah yang terjadi menimbulkan sensasi vibrasi signifikan, menyerupai fenomena seismik, yang mengakibatkan kondisi psikologis berupa kecemasan dan ketakutan di kalangan penduduk. Intensifikasi pergerakan tanah teramati selama periode presipitasi tinggi, memaksa penduduk untuk melakukan evakuasi temporer ke lokasi yang lebih aman.

Respons mitigasi yang diimplementasikan berupa relokasi seluruh keluarga terdampak ke lahan desa yang dialokasikan sebagai zona pemukiman baru. Hal ini dikarenakan rekonstruksi dilakukan pada infrastruktur yang mengalami kerusakan berat atau parah (Sutiyo dan Eviany, 2023). Dokumentasi komparatif antara tahun 2022 dan 2025 memperlihatkan perubahan signifikan pada struktur bangunan, dari kondisi kerusakan parah hingga pembongkaran total setelah proses relokasi dilaksanakan. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi berbasis peternakan tetap dipertahankan di lokasi semula berdasarkan pertimbangan ketersediaan lahan dan keberlangsungan mata pencaharian penduduk.

Temuan ini memiliki implikasi substantif terhadap strategi mitigasi bencana di wilayah dengan karakteristik geologis serupa, terutama terkait urgensi sistem peringatan dini, pemetaan zona rawan, serta pengembangan infrastruktur drainase yang adekuat untuk meminimalisasi risiko pergerakan tanah di masa mendatang.

3.2 Proses Relokasi

Peneliti menganalisis proses relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek menggunakan teori *Resettlement and Reconstruction* yang dikemukakan oleh Cernea (1997). Teori ini menekankan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat di lokasi baru.

Gambar 1 Alur Relokasi



Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Relokasi harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip penting yakni keterlibatan warga, kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.2.1. Keterlibatan Warga

Keterlibatan warga dalam proses relokasi akibat bencana tanah gerak di Desa Puru diimplementasikan melalui serangkaian musyawarah yang berlangsung selama enam bulan. Musyawarah pertama dilaksanakan pada 26 Oktober 2022 di Balai Desa Puru, dihadiri oleh 45 orang termasuk perwakilan dari Kecamatan Suruh, Polsek Suruh, Danposramil Suruh, Pemdes Puru, BPD, berbagai lembaga, dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, warga dilibatkan dalam pembahasan tindak lanjut penanganan tanah gerak, survei lokasi yang aman untuk relokasi, serta pembentukan tim teknis. Pelibatan warga dalam pengambilan keputusan ini berdampak positif, terlihat dari kesepakatan peserta musyawarah untuk menetapkan lokasi relokasi di RT 15/05 Dusun Jajar dengan ukuran panjang tanah 262 meter dan lebar 6-8 meter.

Keputusan relokasi mendapat dukungan penuh dari warga terdampak, sebagaimana disampaikan oleh Kasi Kesra Desa Puru, Murdhian Fratama, bahwa "Semua warga setuju dengan program relokasi ini." Masyarakat memandang relokasi sebagai solusi terbaik untuk menghindari risiko bencana yang lebih besar di masa depan, meskipun keputusan ini menghadirkan tantangan adaptasi terhadap lingkungan baru dan kesulitan akses fasilitas penunjang seperti air bersih dan sanitasi. Keputusan lokasi relokasi didasarkan pada kajian teknis BPBD mengenai aspek keamanan dan minimnya risiko tanah gerak, dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak sosial karena lokasi baru masih berada dalam RT yang sama yakni RT 15 RW 06 Dusun Jajar Desa Puru.

Tabel 1 Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN	STRUKTUR KEANGGOTAAN
1.	SULAMI	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Anggota
2.	MARLAN	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Ketua merangkap Anggota
3.	DIRAH	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Anggota
4.	SAYUDI	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Sekretaris merangkap Anggota
5.	JARIANTO	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Anggota
6.	SUKIDI	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Anggota
7.	SUGENG PRIYANTO	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Anggota
8.	IMAM SOFINGI	Dsn. Jajar RT. 015 RW. 005 Desa Puru	50.000.000,00	Bendahara merangkap Anggota

Sumber : Laporan Pengguna Anggaran Dinas PKPLH Tahun 2023 (Diolah Peneliti, 2025)

Meskipun secara umum warga menyambut positif program relokasi, terdapat keberagaman tanggapan di tingkat keluarga. Sebagian keluarga mendukung keputusan ini karena memprioritaskan keselamatan, namun sebagian lainnya merasa berat meninggalkan tempat tinggal lama dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tantangan utama yang dihadapi warga setelah relokasi meliputi proses pemindahan, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau usaha di lokasi lama, serta keterbatasan fasilitas dasar seperti MCK. Namun demikian, keterlibatan warga dalam seluruh proses pengambilan keputusan telah membantu membangun penerimaan kolektif terhadap program relokasi sebagai langkah mitigasi bencana yang diperlukan untuk keselamatan jangka panjang.

3.2.2 Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial

Kesejahteraan ekonomi dan sosial merupakan aspek krusial dalam keberhasilan relokasi warga terdampak bencana. Keberlanjutan mata pencaharian dan akses terhadap sumber penghidupan menjadi fondasi utama; tanpa jaminan ini, relokasi berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang mengganggu kesejahteraan warga. Selain itu, dimensi sosial seperti dukungan psikologis dan lingkungan yang tenteram juga memegang peranan penting dalam membantu warga membangun kembali kehidupan yang berkualitas di lokasi yang baru.

Pemerintah berupaya untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga terdampak bencana dengan memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah, sehingga mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Penyaluran bantuan ini berupa uang, dengan persyaratan penerima bantuan yang meliputi status Warga Negara Indonesia, berkeluarga, terdampak bencana atau relokasi program pemerintah, memiliki/menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni, serta memiliki keswadayaan dan rencana untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah.

Proses penyaluran bantuan melibatkan pembukaan rekening bank secara kolektif untuk penerima bantuan, pembentukan kelompok penerima bantuan sosial, dan sosialisasi kegiatan relokasi. Bantuan dana yang diterima warga digunakan untuk pengadaan material konstruksi rumah yang layak huni dan aman, meskipun warga juga perlu mengeluarkan biaya tambahan secara swadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah sesuai kebutuhan.

Tabel 2 Penggunaan Material Bantuan Pembangunan Rumah

NO	URAIAN KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
A	MATERIAL RUMAH POKOK			
1	Blandar Kayu (8cm × 12cm × 1m)	Meter	67.000	-
2	Usuk Kayu Tahun (4cm × 6cm × 1m)	Meter	44.000	-
3	Usuk Kayu Tahun (2cm × 3cm × 1m)	Meter	12.000	-
4	Reng Kayu Tahun (2cm × 3cm × 1m)	Meter	12.000	-
5	Genteng pres	Buah	2.300	-
6	Bubung Gentheng	Buah	5.800	-
7	Besi beton Φ 6 mm SNI	35 Biji	31.500	1.102.500
8	Besi beton Φ 8 mm SNI	124 Biji	47.000	5.828.000
9	Besi beton Φ 10 mm SNI		84.000	-
10	Semen @ 40kg	135 Zak	53.000	7.155.000
11	Pasir Beton	28 M ³	320.000	8.960.000
12	Batu Pecah/Krecak ½	26 M ³	310.000	8.060.000
13	Mortar Bata Ringan	11 Zak	70.000	770.000
14	Bata Ringan/Herbel	11 M ³	725.000	7.975.000
15	Kusen Pintu Cor	1 Unit	250.000	250.000
16	Kusen Jendela Cor	5 Unit	200.000	1.000.000
17	Balok Tiang Cor Uk 25×25 Tinggi 30	48 Buah	25.000	1.200.000
18	Balok Cor Ukuran 3 Mtr	31 Buah	65.000	2.015.000
19	Balok Tiang Cor 15×30 Cm	15 Buah	25.000	375.000
20	Semen Acian	12 Zak	105.000	1.260.000
21	Paku reng/usuk	15 Kg	20.000	300.000
22	Cat tembok	20 Kg	25.000	500.000
23	Kawat Baja/Bendrat	19 Kg	17.500	332.500
24	Multiplek	22 Lembar	85.000	1.870.000
B	MATERIAL RUMAH TAMBAHAN			
1	Kuas Roll	1 Buah	13.000	13.000
2	Benang	2 Buah	9.500	19.000
3	Timba	10 Buah	15.000	150.000
4	Talang Karet 60 Cm	20 Meter	15.000	300.000
5	Galvalume 2 Mtr	8 Lembar	30.000	240.000
6	Lisplang 40 Cm × 2 Mtr	5 Lonjor	65.000	325.000
TOTAL				50.000.000

Sumber : Laporan Pengguna Anggaran Dinas PKPLH Tahun 2023

3.2.3. Keberlanjutan Lingkungan

Program relokasi di Desa Puru tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian yang aman, tetapi juga pada menciptakan lingkungan yang layak huni dalam jangka panjang. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap fasilitas umum, pendidikan, serta peluang ekonomi bagi warga. Serah terima rumah relokasi dilakukan secara lisan, dengan Dinas PKPLH menyerahkan tanggung jawab pembangunan lanjutan kepada warga. Dengan demikian, warga memiliki peran aktif dalam memastikan rumah mereka memenuhi kebutuhan individu dan keluarga.

Keberlanjutan lingkungan dalam relokasi ini diwujudkan melalui mitigasi dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Lokasi relokasi dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan dari bencana, dengan lahan yang stabil dan aksesibilitas yang baik ke fasilitas umum. Upaya pencegahan bencana juga dilakukan melalui edukasi masyarakat dan pembentukan tim siaga bencana. Meskipun demikian, sistem peringatan dini khusus untuk tanah gerak masih perlu dikembangkan.

Pengelolaan sumber daya alam di lokasi relokasi mencakup penyediaan akses air bersih melalui PAMSIMAS yang berfungsi baik. Namun, pemanfaatan lahan untuk pertanian masih terbatas, memerlukan adaptasi dari warga. Sistem pengelolaan sampah telah dimulai dengan pemilahan sampah oleh warga dan kelompok pengelola. Meskipun ada langkah positif, penguatan lebih lanjut diperlukan dalam peringatan dini bencana, pemanfaatan lahan pertanian, dan optimalisasi pengelolaan sampah untuk mencapai keberlanjutan lingkungan yang lebih efektif.

Analisis relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru menggunakan teori *Resettlement and Reconstruction Model* oleh Michael Cernea menunjukkan keberhasilan dalam penerapan prinsip keterlibatan warga dan kesejahteraan ekonomi-sosial. Warga berpartisipasi aktif sejak tahap perencanaan hingga implementasi, memberikan rasa kepemilikan terhadap proses relokasi. Lokasi baru yang strategis telah meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan akses lebih baik terhadap sumber daya dan fasilitas umum, sehingga meminimalkan risiko marginalisasi ekonomi yang sering terjadi dalam kasus relokasi paksa.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam aspek keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kelemahan sistem peringatan dini, keterbatasan ketersediaan air, dan tidak adanya akses terhadap lahan pertanian di sekitar lokasi relokasi menjadi kendala bagi warga yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian. Secara keseluruhan, relokasi di Desa Puru tidak hanya berfokus pada pemindahan fisik semata, tetapi juga pada upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup warga melalui perencanaan yang matang dan penyediaan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat di lokasi baru.

3.3 Dampak Relokasi

3.3.1 Dampak Relokasi di Bidang Sosial

Implementasi relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru tidak mengindikasikan perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat karena lokasi permukiman baru masih berada dalam satu entitas administratif yang sama (RT). Lokasi strategis pada area yang berdekatan dengan jalan raya nasional menghadirkan aksesibilitas superior terhadap fasilitas publik, meningkatkan mobilitas sosial penduduk dibandingkan kondisi sebelumnya di lokasi yang relatif terisolasi. Fenomena ini secara simultan meningkatkan kualitas hunian dan tingkat kenyamanan, serta mengintensifikasi peluang interaksi dengan komunitas yang lebih luas, yang berdampak pada penguatan kohesi sosial dalam komunitas.

3.3.2 Dampak Relokasi di Bidang Ekonomi

Perpindahan ke lokasi yang berdekatan dengan infrastruktur transportasi utama memberikan implikasi ekonomi positif, khususnya dalam hal efisiensi distribusi komoditas pertanian dan peternakan yang menjadi basis mata pencaharian mayoritas penduduk. Meskipun terjadi relokasi tempat tinggal, struktur ekonomi tidak mengalami transformasi fundamental karena penduduk tetap mempertahankan akses pada lahan pertanian dan peternakan di lokasi semula. Peningkatan aksesibilitas terhadap pasar dan pusat ekonomi berkorelasi dengan reduksi biaya transportasi dan optimalisasi potensi pendapatan, menciptakan kondisi yang kondusif untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Aksesibilitas yang lebih baik juga berkontribusi pada efisiensi biaya pendidikan bagi segmen pelajar dan mahasiswa, yang secara tidak langsung menginvestasikan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut.

3.3.3 Dampak Relokasi di Bidang Psikologis

Transisi ke lokasi yang lebih stabil secara geologis menghasilkan signifikansi psikologis berupa reduksi kecemasan dan peningkatan persepsi keamanan di kalangan penduduk terdampak, setelah sebelumnya menghadapi ketidakpastian akibat progresivitas kerusakan struktural pada hunian mereka. Fenomena kelegaan mental terobservasi pada mayoritas penduduk, tercermin dari manifestasi rasa syukur dan optimisme terhadap kondisi kehidupan yang lebih terjamin, meskipun simultan dengan tantangan adaptasi, terutama bagi kelompok lanjut usia. Meskipun terdapat indikasi stres adaptif terkait pengaturan akses ke lahan pertanian dan peternakan yang kini berjarak lebih jauh, secara kolektif dampak psikologis bernilai positif dengan dominasi perasaan aman dan harapan untuk masa depan yang lebih stabil. Solidaritas sosial yang terbangun dalam proses relokasi berfungsi sebagai mekanisme koping komunal yang memitigasi tekanan psikologis individual, memfasilitasi transisi yang lebih lancar ke lingkungan baru.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga Desa Puru berpartisipasi aktif dalam proses relokasi, mulai dari sosialisasi, pembukaan rekening bantuan, hingga pembangunan rumah. Sama halnya dengan penelitian Ardiyanto (2017) di Gunungkidul yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat sejak awal proses relokasi meningkatkan keberhasilan program. Namun, berbeda dengan penelitian Ikhwan & Widiyanto (2023) yang menyebutkan bahwa partisipasi warga masih bersifat pasif dan top-down, dalam kasus Desa Puru warga justru dilibatkan aktif, terutama dalam pemilihan lokasi dan pengelolaan bantuan.

Penelitian ini menemukan bahwa warga menerima bantuan senilai Rp 50 juta untuk pembangunan rumah. Meskipun begitu, sebagian warga mengalami penurunan pendapatan karena akses terhadap lahan produktif menjadi terbatas. Temuan ini memperkuat temuan Purwanto (2017), bahwa relokasi harus dibarengi dengan dukungan akses ekonomi. Temuan ini menolak hasil penelitian Achmad (2019) di Sigi yang menyatakan bahwa relokasi menyebabkan kegagalan ekonomi karena warga kehilangan sumber mata pencaharian—berbeda dengan warga Desa Puru yang masih bisa memanfaatkan lahan peternakan di lokasi lama.

Relokasi dilakukan di zona aman dari tanah gerak, sesuai dengan prinsip mitigasi. Hal ini memperkuat penelitian Rosita (2018) yang menekankan pentingnya pemilihan lokasi secara geologis aman dalam kebijakan mitigasi. Namun, akses terhadap air bersih masih menjadi kendala, karena kapasitas program PAMSIMAS belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan warga. Sama halnya dengan temuan Ikhwan & Widiyanto (2023), bahwa keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan dari lokasi aman, tetapi juga ketersediaan infrastruktur dasar.

Penelitian menemukan bahwa warga merasa lebih tenang karena jauh dari ancaman bencana, meskipun beberapa masih mengalami trauma. Temuan ini memperkuat model *“Resettlement and Reconstruction”* dari M. Cernea (1997) yang menyatakan bahwa relokasi berhasil bila mampu mengembalikan rasa aman. Sama halnya dengan penelitian Naibaho & Murniati (2022), dukungan sosial menjadi kunci dalam pemulihan psikologis warga setelah relokasi.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

3.5.1 Kegiatan Peternakan Masih Dilakukan di Lokasi Lama

Salah satu temuan paling unik adalah fakta bahwa meskipun warga telah direlokasi secara fisik ke lokasi baru, mereka tetap melakukan aktivitas peternakan di wilayah terdampak bencana (lokasi lama). Ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap lahan lama, dan bahwa relokasi tidak sepenuhnya memutus keterikatan fungsional terhadap area berisiko.

3.5.2 Relokasi Tetap Mempertahankan Struktur Sosial Komunitas

Relokasi dilakukan secara kelompok dan terintegrasi, sehingga struktur sosial dan hubungan antarwarga tetap terjaga. Ini berkontribusi pada proses adaptasi sosial yang lebih cepat, minim konflik, dan tetap terciptanya rasa aman secara kolektif—sesuatu yang sering menjadi kendala dalam proses relokasi di tempat lain.

3.5.3 Partisipasi Warga dalam Penggunaan Dana Bantuan

Penelitian ini juga mencatat bahwa warga tidak hanya pasif menerima bantuan, tetapi aktif mengelola dan menggunakan bantuan pembangunan rumah sesuai kebutuhan mereka, menunjukkan adanya otonomi dalam pemanfaatan bantuan pascabencana.

3.5.4 Pemilihan Lokasi Relokasi Berdasarkan Konsultasi dan Strategis

Lokasi relokasi dipilih bukan hanya berdasarkan keamanan geologis, tapi juga aksesibilitas terhadap pusat layanan publik dan transportasi, yang memperlihatkan perencanaan relokasi yang lebih terarah dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek merupakan langkah mitigasi yang telah dilaksanakan secara cukup efektif, dengan mempertimbangkan aspek keterlibatan warga, kesejahteraan sosial ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Warga menunjukkan partisipasi aktif dalam proses relokasi mulai dari sosialisasi hingga pembangunan rumah baru, dan meskipun sebagian mengalami keterbatasan akses terhadap lahan produktif, mereka tetap mampu mempertahankan aktivitas ekonomi seperti peternakan di lokasi lama. Relokasi juga memberikan rasa aman baru bagi warga meski trauma psikologis akibat bencana masih dirasakan sebagian. Lokasi relokasi telah dipilih secara strategis di zona aman dari tanah gerak, meskipun sarana dasar seperti air bersih masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, relokasi ini mampu menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi warga dengan beberapa catatan perbaikan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang cenderung fokus pada pengalaman subyektif warga terdampak dan aparat pelaksana relokasi, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika yang lebih luas terkait dampak relokasi jangka panjang. Hal ini dipengaruhi oleh pendekatan deskriptif kualitatif yang mengandalkan teknik wawancara mendalam dan observasi, di mana validitas eksternal atau *generalisasi* hasil menjadi terbatas Yin (2018). Selain itu, penelitian ini belum mengeksplorasi secara kuantitatif perubahan indikator kesejahteraan ekonomi warga setelah relokasi, seperti pendapatan, pengeluaran, atau tingkat konsumsi. Dalam konteks teori *Resettlement and Reconstruction* oleh Cernea (1997), keterbatasan ini membuat evaluasi risiko pemiskinan dan marginalisasi belum dapat disimpulkan secara komprehensif. Penelitian juga belum melibatkan analisis komparatif antara warga yang direlokasi dengan yang memilih bertahan, yang sesungguhnya penting untuk menilai efektivitas kebijakan secara lebih menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian sebaiknya difokuskan pada pengembangan kajian yang lebih holistik dan kuantitatif terkait dampak jangka panjang relokasi terhadap kesejahteraan ekonomi, psikologis, dan sosial masyarakat terdampak bencana. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan metode campuran (*mixed methods*) untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, seperti pengukuran pendapatan rumah tangga, indeks kebahagiaan, dan stabilitas sosial setelah relokasi. Selain itu, studi longitudinal sangat diperlukan guna mengevaluasi keberlanjutan adaptasi warga dalam kurun waktu tertentu, serta efektivitas kebijakan relokasi dalam menekan risiko pemiskinan sebagaimana dikemukakan dalam *Risks and Reconstruction Model* oleh Cernea (1997). Penelitian mendatang juga diharapkan dapat membandingkan berbagai model relokasi di daerah lain agar dapat disusun rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala pelaksana BPBD Trenggalek, Kepala Dinas PKPLH Trenggalek. Camat Suruh, dan Kepala Desa Puru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. (2019). *KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (Studi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)*. <http://repository.stpn.ac.id/id/eprint/496>
- Ardiyanto. (2017). *RELOKASI MASYARAKAT RAWAN BENCANA : Studi Tahap Relokasi Di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul* (Vol. 6). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27879>
- Darlahanus, D., Maulana, R., Asih, A. sumarah, & Sari, S. N. (2024). Analisis Rencana Pembangunan Lokasi Relokasi Dusun Jati Rejo, Kabupaten Bantul. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Ilmu Komputer*, 3(1), 27–34. <https://doi.org/10.55123/storage.v3i1.3134>
- Frege, I. A., Bliecke, V., Bradshaw, S., Dijkzeul, D., Funke, C., Kienzl, P., Kusters, K., Masuch, L., Nasreen, M., Radtke, K., Schneider, S., Thielborger, P., Weller, D., Wiegers, O., Yaman, D. K., & Zennig, K. (2023). *WorldRiskReport 2023*. <https://www.preventionweb.net/quick/80497>
- Ikhwan, E. E., & Widianto, H. W. (2023). Landslide Mitigation Through Resettlement In Wukirsari Village Imogiri Sub-District Bantul Regency. *Journal of Public Policy and Administration Research Volume 08 No 03 (2023)*, 08, 1–12. <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/article/view/21197/18810>
- Irwanto. (2006). *FOCUSED GROUP DISCUSSION Sebuah Pengantar Praktis*. Yayasan Obor Indonesia.
- M. Cernea, M. (1997). Impoverishment Risks , Risk Management , and Reconstruction : A Model of Population Displacement and Resettlement. *UN Symposium on Hydropower and Sustainable Development*, 1–61. <https://www-jstor-org.myaccess.library.utoronto.ca/stable/pdf/4409836.pdf?refreqid=excelsior%3Ac7e809190ef508427c11106c158d78a2>
- Miranda, A., Liando, D., & Ismail, R. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Relokasi Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47386>
- Naibaho, S. L., & Murniati, J. (2022). *DUKUNGAN SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN ADAPTASI MAHASISWA PERANTAU YANG TINGGAL DI ASRAMA JAKARTA*. <https://doi.org/10.24854/jpu465>
- Orefice, S., & Innocenti, C. (2024). Regional assessment of coastal landslide susceptibility in Liguria, Northern Italy, using MaxEnt. *Natural Hazards*, May, 11069. <https://doi.org/10.1007/s11069-024-06833-5>
- Purwanto, F. (2017). Upaya Penanggulangan Korban Bencana Tanah Longsor Oleh BPBD Pacitan Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. *Occupational Medicine*, 53(4), 130. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27719>
- Robert K. Yin. (2018). Case Study Research and Applications. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rosita, A., Aryanto, D., Noorainy, F., Slamet, M., & Permadi, D. (2018). Daerah Rawan Bencana Geologi Gerakan Tanah Dalam Arah Kebijakan Mitigasi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Planologi Unpas*, 5(1), 885. <https://doi.org/10.23969/planologi.v5i1.927>
- Simangunsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA BANDUNG.
- Sutiyo dan Eviany. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. PT Nas Media Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3dDSEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=perlindungan+masyarakat&ots=WklFpsnt8o&sig=f95rrJcQoL1TuNlcF1Pqw7jkntg>